

Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang

Rawintan Endas Binti¹, Rahma Yuliani*², Sustinah Limarjani³, Alfian Misran⁴, Enny Hardy⁵, Nur Astri Sari⁶, Muhammad Yasin⁷

^{1,2,3}Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

*e-mail: rahma.yuliani@ulm.ac.id ¹

Received: 25 Mei 2021/ Accepted: 16 Juni 2021

Abstract

BUMDes Kayu Bawang which is located in Gambut, Banjar Regency, South Kalimantan is one of the BUMDes that has received village funds and has initiated several business activities such as duck farming, savings and loan businesses and building blocks. The success of BUMDes Kayu Bawang depends on BUMDes management related to planning, organizing, actualizing, controlling and evaluating (Yuliani, 2017). These five things have not been implemented optimally in the management of BUMDes Kayu Bawang so that the business unit they have started has failed. The failure of the business unit at the Kayu Bawang BUMDes is also related to the transparency and accountability of the financial management of village funds. Where the preparation of financial reports on BUMDes is the main obstacle due to the limited ability of human resources in managing BUMDes. Therefore it is necessary to design an appropriate application, training and assistance in the planning and preparation process of the BUMDes Kayu Bawang financial report. The right technology application is needed so that BUMDes Kayu Bawang can compile financial reports in an integrated manner in the context of transparency and accountability. The Ministry of Finance's Guidelines on BUMDes Financial Reports state that reports prepared by BUMDes managers must comply with Financial Accounting Standards.
Keywords: BUMDes, Financial Reports, Financial Accounting Standards

Abstrak

BUMDes Kayu Bawang yang berlokasi di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan salah satu BUMDes yang mendapatkan dana desa dan telah beberapa kali melakukan inisiasi kegiatan usaha yaitu diantaranya peternakan itik, usaha simpan pinjam dan pembuatan batako. Keberhasilan BUMDes Kayu Bawang bergantung pada manajemen BUMDes terkait perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, pengendalian dan pengevaluasian (Yuliani, 2017). Kelima hal tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dalam pengelolaan BUMDes Kayu Bawang sehingga unit usaha yang mereka rintis mengalami kegagalan. Kegagalan unit usaha pada BUMDes Kayu Bawang juga terkait pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dimana penyusunan laporan keuangan pada BUMDes menjadi kendala utama karena adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes. Maka dari itu perlu dilakukan perancangan aplikasi yang sesuai, pelatihan dan pendampingan pada perencanaan dan proses penyusunan laporan keuangan BUMDes kayu Bawang. Penerapan teknologi yang tepat diperlukan agar BUMDes Kayu Bawang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan secara terintegritas dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Pedoman Kementerian Keuangan tentang Laporan Keuangan BUMDes menyatakan bahwa laporan yang disusun oleh pengelola BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kata kunci: BUMDes, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Permendes No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Pada tahun 2017 pemerintah telah menyalurkan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Kementerian desa, Permendes digunakan sebagai pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa dan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Dana desa dipergunakan untuk kegiatan desa yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat desa. Program tersebut membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa dan prioritas utama pada pemberdayaan masyarakat desa (Junaid et al., 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas pemberdayaan masyarakat desa meliputi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengembangan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas dan dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya (Mardikanto & Soebianto, 2017). Selain itu untuk dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan atau bersama dengan BUMDes, dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dana atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya dan sesuai dengan analisa kebutuhan desa ditetapkan dalam musyawarah desa.

Permendes No. 4/2015 pasal 19 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan bisnis sosial. Bisnis sosial merupakan bisnis yang di lakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Paradigma BUMDes sebagai bisnis sosial harus selalu dipahami agar bukan semata-mata mencari laba untuk pihak-pihak tertentu tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan harapan BUMDes harus selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan tidak tergantung terhadap Dana Desa. BUMDes dapat menjadikan kemandirian desa dan membuat perubahan yang lebih baik. Perubahan dalam Pembangunan perekonomian dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat desa (Mutiarni et al., 2018). Masyarakat desa diharapkan mandiri dan sejahtera sesuai dengan potensi desa. Pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat desa (Hidayah et al., 2018).

Dana desa untuk desa tertinggal pada tahun 2017 dapat dialokasikan pada bidang infrastruktur, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi sebagai keperluan operasional BUMDes, serta pemberdayaan dan pelatihan. Bidang infrastruktur meliputi pembangunan jalan menuju desa agar terciptanya kemudahan akses menuju desa, sedangkan bidang sosial dasar meliputi akses air bersih, sanitasi, listrik dan PAUD. Pengembangan perekonomian meliputi pengembangan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDES dan koperasi sehingga dapat mendorong pergerakan ekonomi pedesaan.

Pengembangan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pendirian BUMDes berdasar pada potensi dan kebutuhan desa (Junaidi, 2020). Masyarakat Desa Kayu Bawang Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. BUMDes Kayu Bawang telah lama berdiri tetapi belum terdapat perubahan perekonomian yang cukup signifikan pada masyarakat setempat. BUMDes tersebut selalu mengalami kerugian pada setiap program yang dilaksanakan. Program-program tersebut di antaranya program peternakan itik, koperasi simpan pinjam, jual beli gabah dan lain-lain. Pada tahun 2017, terdapat pembelian traktor untuk desa Kayu Bawang, traktor tersebut juga belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Salah satu penyebab kegagalan usaha BUMDes Kayu Bawang karena lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan terkait perencanaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan usaha.

Pengelolaan keuangan BUMDes Kayu Bawang telah lama mengalami berbagai kendala, penelitian Yuliani (2017) menggambarkan perkembangan BUMDes di desa Kayu Bawang Gambut kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMdes. Pelaporan keuangan pada BUMdes Kayu Bawang dilakukan hanya terbatas pada pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Pencatatan

dilakukan secara tradisional yaitu manual melalui buku, dimana hal tersebut tidak efektif terkait pengarsipan data keuangan.

NO	TANGGAL	URAIAN	PEROLEHAN	BELANJA
1		Kas 10 Januari 2020		
2		Saldo		
4	10 Januari 2020	Bayar Tanah Desa (11 Hari)	Rp. 1.000.000	
5	10 Januari 2020	Bayar Tanah Desa (11 Hari)	Rp. 1.000.000	
6	10 Januari 2020	Beli Pupuk Desa (MTC) dan Bayar 10-PB 2020	Rp. 1.000.000	
		Saldo		
		Jumlah	Rp. 3.000.000	
		Saldo	Rp. 44.000.000	Rp. 3.000.000
114	1 Januari 2020	Kas 10 Januari 2020		
214	1 Januari 2020	Saldo		
315	1 Januari 2020	Bayar 10-PB 2020	Rp. 1.000.000	
416	1 Januari 2020	Bayar 10-PB 2020	Rp. 1.000.000	
517	1 Januari 2020	Bayar 10-PB 2020	Rp. 1.000.000	
		Jumlah	Rp. 3.000.000	
		Saldo	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
1200		Jumlah	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
		Saldo Tahun 2019	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		Saldo Tahun 2019		Rp. 727.200
120 - 28 Maret 2020		Kas tahun 2019		
		Saldo 2019		
		Saldo 2019	Rp. 1.000.000	
220 - 28 Maret 2020		Bayar Operator + Kawang 2020	Rp. 2.000.000	
3		Beli Bensin 1 kg + Bensin 2,8 m + Bensin + Bensin	Rp. 1.000.000	
4		Beli Bensin 1 kg + Bensin 2,8 m + Bensin + Bensin	Rp. 1.000.000	
5		Beli Bensin 1 kg + Bensin 2,8 m + Bensin + Bensin	Rp. 1.000.000	
6		Konsumsi	Rp. 1.000.000	
		Jumlah	Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000
		Saldo	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
		Jumlah	Rp. 4.000.000	Rp. 8.000.000
		Saldo	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
114 Juli 2020		Kas	Rp. 1.000.000	
214 Juli 2020		Bayar GPR Internet Comban	Rp. 1.000.000	
		Saldo	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		Jumlah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

Gambar 1. Penyajian Laporan Keuangan BUMdes Kayu Bawang

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola selama satu periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Asas pengelolaan keuangan Desa, yaitu:

- Transparan : pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan desa harus secara terbuka, sebab keuangan adalah milik rakyat atau barang public harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Fungsi dari transparansi adalah meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada aparatur desa.
- Akuntabilitas : pertanggung jawaban pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang berikan. Keuangan desa di catat, di hitung dan dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat agar pertanggung jawaban keuangan
- Partisipatif : pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada partisipatif masyarakat untuk menentukan kebutuhan masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.
- Responsif: Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) harus responsif terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa dijangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecuali hanya perumusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Penyajian laporan keuangan perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban alokasi dana desa oleh BUMdes. Menurut Irham Fahmi (2011, p.8), Laporan keuangan sebagai sarana penyampaian informasi memiliki karakteristik :

- a) Dapat dipahami, laporan keuangan disajikan dengan bahasa yang sederhana, formal dan dapat dimengerti oleh semua pihak
- b) Relevan, laporan keuangan memuat informasi yang memiliki nilai prediktif agar dapat menjadi acuan dasar dalam pengambilan keputusan pada entitas
- c) Dapat dipercaya, laporan keuangan disajikan dengan prinsip kehati-hatian, lengkap dan mengutamakan hakikat ekonomi
- d) Dapat dibandingkan, laporan keuangan memuat informasi keuangan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan keuangan akan menunjukkan dua kondisi yaitu kerugian atau keuntungan (Harahap, 2011, p.25). Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam melihat perkembangan BUMdes. Pedoman Kementerian Keuangan tentang Laporan Keuangan BUMDes menyatakan bahwa laporan yang disusun oleh pengelola BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar, yaitu penyajian data transaksi atau peristiwa lain yang mempengaruhi kondisi keuangan serta kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan maupun beban secara apa adanya. Lebih lanjut, SAK ETAP (2013) menyatakan bahwa informasi dalam penyajian laporan keuangan memuat informasi komparatif minimal dalam rentang waktu satu tahun sekali.

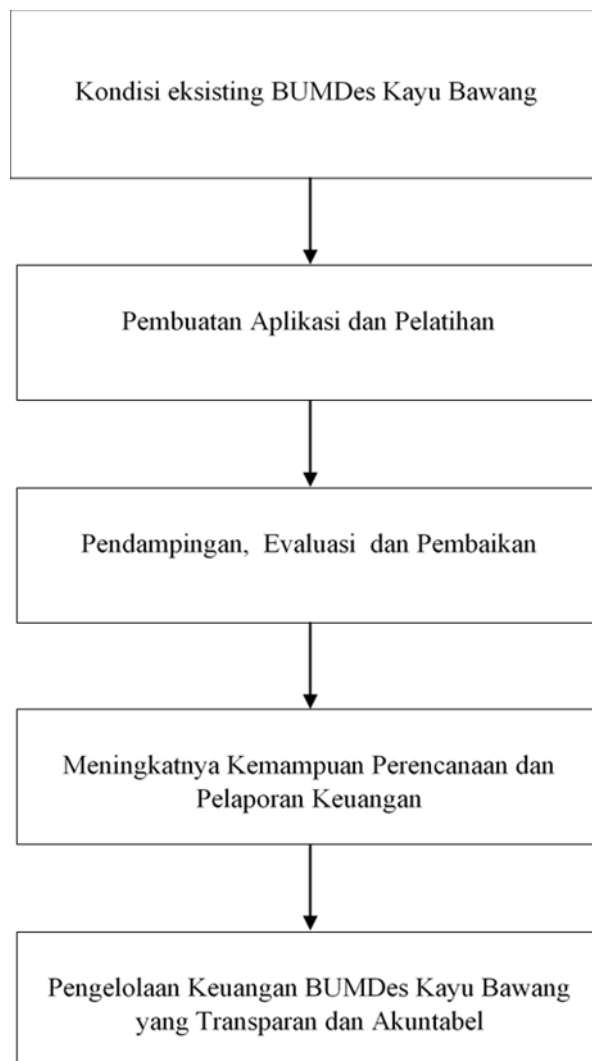
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMdes Kayu Bawang belum melakukan penyajian laporan keuangan secara komprehensif dan sesuai dengan pedoman pada standar akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan harus memuat informasi komparatif minimal 1 tahun terkait posisi harta, utang, modal, penerimaan, biaya – biaya, serta aliran dana secara lengkap. Sedangkan, BUMDes Kayu Bawang hanya melakukan pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran.

Sistem pencatatan secara tradisional melalui buku yang digunakan BUMDes Kayu Bawang tidak memungkinkan adanya integrasi dan keefektifan dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangan. Pencatatan melalui buku memiliki resiko yang tinggi dalam sistem pengarsipan data pada situasi seperti terjadinya bencana alam ataupun kebakaran. Diperlukan pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia pengelola BUMDes agar pencatatan dapat dilakukan secara digital melalui sistem komputer.

Digitalisasi pencatatan akan diwujudkan melalui perancangan aplikasi, pelatihan dan pendampingan perencanaan serta pelaporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pengelola BUMDes Kayu Bawang mampu melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMDes dalam pengembangan masyarakat desa dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kayu Bawang.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada BUMDes Kayu Bawang BUMDes Kayu Bawang memerlukan adanya perubahan dalam hal perlakuan pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes mengakibatkan pencatatan akuntansi hanya terbatas pada pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan secara tradisional melalui buku, hal ini tidak relevan baik dari segi standar pencatatan dan penyajian laporan keuangan maupun dengan perkembangan zaman. Diperlukan adanya sistem aplikasi yang sesuai dengan keperluan usaha, pelatihan serta pendampingan terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi. Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan hal ini, yaitu :



Bagan 1. Mekanisme Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Survey Pendahuluan

Kegiatan survey dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi kondisi terkini (*existing condition*) BUMDes terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan baik dari segi sumber daya manusia maupun adanya kendala teknis. Berdasarkan hasil survey, diidentifikasi permasalahan dan kondisi yaitu :

- a) Terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berdampak pada terhentinya kegiatan BUMDes pada periode sebelumnya. Perangkat desa memilih untuk menunggu pemilihan Kepala Desa periode berikutnya pada tahun 2021
- b) Pengelolaan dana desa dijalankan dengan usaha tanpa badan hukum hal ini mengingat adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk dapat melaporkan pemanfaatan desa tersebut salah satunya dengan pembentukan usaha yang dilakukan saat ini.
- c) Terdapat keterbatasan pengetahuan perangkat desa terkait adanya kewajiban pembentukan badan hukum serta aturan terkait kepengurusan terutama dalam hal tugas dan fungsi pengawas BUMDes, sehingga pentingnya pemisahan wewenang antara perangkat desa dengan pengurus BUMDes belum menjadi perhatian
- d) Adanya tuntutan warga desa terkait transparansi dan imbal balik berupa dana yang dimanfaatkan dari usaha pada BUMDes. Upaya perangkat desa dalam memenuhi tuntutan transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan dana masuk dan keluar melalui spanduk hingga *flyer* yang dibagikan kepada warga melalui Ketua RT
- e) Terbatasnya sumber daya manusia baik pada struktur perangkat desa maupun struktur BUMdes, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pejabat desa dan minimnya kontribusi masyarakat yang tergolong berusia muda dan kompeten untuk menjalankan system informasi maupun pembuatan laporan.
- f) Belum terdapat aplikasi ataupun sistem informasi sederhana pada BUMdes yang dapat mengakomodir pelaporan keuangan terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Dibutuhkan sistem informasi dengan karakteristik pengoperasian masukan (*input*) data secara sederhana sehingga memudahkan pekerjaan pihak pelaksana, dengan harapan sistem tersebut mampu menyajikan informasi terkait keadaan laba/rugi dari pendapatan usaha serta biaya – biaya dalam pelaksanaan kegiatan usaha.



2. Pembuatan Aplikasi dan I

Gambar 2. Diskusi Dengan Perangkat Desa

Berdasarkan hasil survey pendahuluan, maka dapat ditentukan bentuk perancangan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes Kayu Bawang dalam melakukan pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan serta berbagai kelengkapan bahan/perangkat pelatihan yang diperlukan terkait penggunaan sistem aplikasi. Tahapan pertama yang dilakukan adalah menyusun komponen input untuk kemudian akan menentukan output dari sistem aplikasi yang telah dibentuk. Perancangan sistem aplikasi didasarkan pada kebutuhan BUMDes. Tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan, sistem aplikasi dirancang agar dapat mengakomodir pencatatan keuangan secara terstruktur dan sistematis, mengingat kurang optimalnya pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan BUMDes Kayu Bawang. Sistem dirancang untuk dapat menyajikan informasi kegiatan BUMDes baik kegiatan usaha hingga pencatatan pengeluaran operasional maupun pengeluaran terkait penambahan aset serta pencatatan atas pendapatan dalam suatu periode akuntansi.

INFORMASI USAHA	
Nama Usaha	Usaha Jaya Barat
Tahun Transaksi	2020
Kota/ Kabupaten	Banjar
Nama Pimpinan	Mr. H
Modal Awal	400.000.000
Utang Bank	-

Tabel 1. Format Pencatatan Kegiatan Usaha

PEMASUKAN			
Tanggal	Uraian	Nominal	Cash/ Kredit
Sabtu, 01 Februari 2020	jasa angkut baranng	Rp 500.000	Cash
Rabu, 05 Februari 2020	jasa angkut tanah	Rp 100.000	Kredit
Total		Rp 600.000	

Tabel 2. Format Pendapatan

PENGELUARAN									
Pengeluaran				Aset tetap					
Tanggal	Uraian	Nominal	Cash/ Kredit	Tanggal	Uraian	Nominal	Cash/ Kredit	Perkiraan Usia Ekonomi	Perkiraan Nilai Jual Lagi
Rabu, 01 Januari 2020	upah supir	Rp 200.000	Kredit	Rabu, 01 Januari 2020	trak	Rp 100.000.000	Kredit	5	Rp50.000.000
Rabu, 01 Januari 2020	servis motor	Rp 100.000	Cash						
Total		Rp 300.000		Total		Rp 100.000.000			

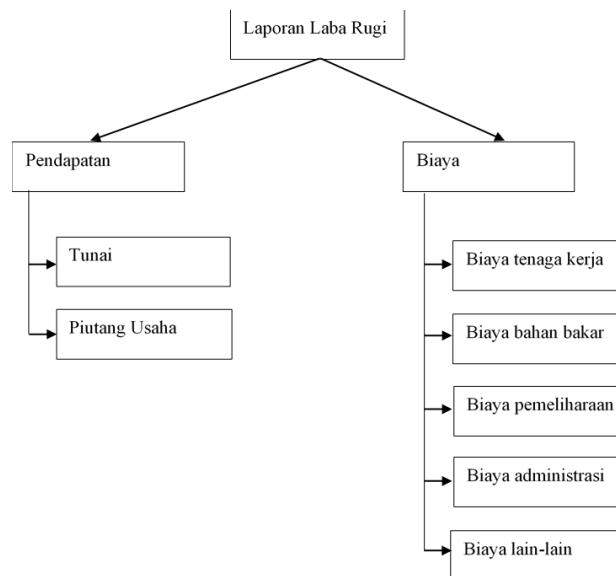
Tabel 3. Format Pencatatan Pengeluaran Dana

Pada akhir periode, pencatatan atas kegiatan transaksi akan disajikan dalam laporan neraca yang memuat informasi terkait aktiva yaitu total aset baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta informasi terkait pasiva yaitu hutang dan modal BUMDes pada periode tertentu.

NERACA			
Usaha Jaya Barat			
Per "Tanggal"			
AKTIVA		PASIVA	
Kas	400.400.000	Modal	400.000.000
Piutang Usaha	100.000	Utang Bank	0
Aset Tetap	100.000.000		
Akumulasi Penyusutan	-10.000.000		
		Laba/ Rugi	-9.700.000
		Utang Usaha	100.200.000
TOTAL	Rp 490.500.000	TOTAL	Rp 490.500.000

Tabel 4. Penyusunan Laporan Neraca

Klasifikasi akun yang menjadi data masukan atau penginputan yaitu pendapatan dan biaya. Akun pendapatan digolongkan menjadi pendapatan usaha tunai dan pendapatan usaha piutang. Sedangkan, biaya digolongkan menjadi biaya tenaga kerja/operator, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan/perbaikan, biaya administrasi dan umum, serta biaya lain-lain. Data terkait akun berdasarkan masing-masing pengklasifikasian tersebut kemudian akan disajikan dalam Laporan Laba/Rugi. Adapapun penyusunan laporan laba rugi akan didasarkan pada skema berikut:



Bagan 2. Skema Penyusunan Laporan Laba/Rugi

Penginputan data berdasarkan klasifikasi akun dan skema penyusunan Laporan Laba/Rugi akan disajikan oleh sistem secara terstruktur sesuai format umum Laporan Laba/Rugi. Sistem akan secara otomatis melakukan penghitungan jumlah pencapatan dan biaya, hasil penghitungan akan meunjukkan keadaan laba/rugi.

LAPORAN LABA RUGI					
Usaha Jaya Barat					
Per "Tanggal"					
Pemasukan					600.000
Akumulasi Penyusutan					-10.000.000
					-Rp9.400.000
Biaya Pengeluaran					
upah supir		200.000			
servis motor		100.000			
				+	
TOTAL BIAYA	Rp	300.000	---->		Rp 300.000
LABA BERSIH					-Rp 9.700.000

Tabel 4. Penyusunan Laporan Laba/Rugi

3. Pendampingan Perangkat Desa BUMDes

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan pengenalan sistem aplikasi yang telah dibentuk kepada perangkat desa melalui pelatihan dan simulasi pengoperasian sistem aplikasi tersebut. Kegiatan pendampingan diawali dengan mengedukasi perangkat desa terkait peraturan badan hukum BUMDes yang diatur dalam Permendes PDTT (Peraturan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Edukasi terkait peraturan pengelolaan BUMDes bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan perangkat desa dalam menyesuaikan segala keadaan dan kondisi pada BUMDes dengan berdasar pada peraturan yang seharusnya. Dengan memahami aturan, maka perangkat desa akan mampu memahami pentingnya keberadaan sistem aplikasi pengelolaan BUMDes secara terintegrasi dan sistematis.



Gambar 4. Penyampaian Materi

Pengenalan sistem aplikasi kepada seluruh perangkat desa merupakan tahap awal sebelum terjun langsung dalam penggunaan aplikasi. Hal ini bertujuan agar seluruh perangkat desa baik yang bertugas sebagai operator maupun tidak dapat memahami fungsi dari aplikasi. Pemahaman perangkat desa menjadi prasyarat untuk dilakukannya intruksi pengoperasian serta simulasi penggunaan aplikasi. Simulasi dilakukan dengan tujuan, agar calon

operator/administrator mampu mengimplementasikan aktivitas keuangan dari kondisi terkini dan mampu mencapai tujuan akhir yaitu mengetahui laba/rugi dari transaksi berdasarkan aktivitas BUMdes yang dijalankan.



Gambar 4. Simulasi Pengoperasian Sistem Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan

4. Evaluasi

Setiap pendampingan akan dievaluasi untuk menilai kemajuan, kendala dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Evaluasi dilaksanakan dengan metode jarak jauh yakni dengan melakukan *monitoring* secara daring (dalam jaringan) mengingat kegiatan berlangsung pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan monitoring secara daring dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komunikasi yang memudahkan kedua belah pihak untuk dapat melakukan evaluasi perkembangan baik dari segi sistem maupun kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengoperasian. Evaluasi juga dijalankan secara menyeluruh dengan berbagai perbaikan aplikasi berdasarkan kegiatan pendampingan yang dijalankan sebelumnya.

5. Hasil Akhir

Setelah melalui pelatihan dan pendampingan diharapkan para pengelola mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Aplikasi yang telah disempurnakan diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan output dari aplikasi yang telah diberikan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan BUMDes. Karena sejatinya peran sistem aplikasi hanya sebagai alat atau sarana penunjang dari efektivitas pelaporan, perangkat desa sebagai pengelola BUMDes sendiri yang akan menentukan optimalisasi dari penggunaan sistem aplikasi tersebut dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa, pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

- a) Kegiatan BUMDes belum berjalan secara optimal karena lemahnya pengelolaan

- b) Pencatatan dan penyajian laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akibat adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan BUMDes Kayu Bawang
- c) Digitalisasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyajian informasi keuangan
- d) Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan BUMDes Kayu Bawang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan alokasi dana desa yang berujung pada kegagalan program BUMDes.
- e) Pengelolaan BUMDes memerlukan adanya perhatian, terutama dalam hal sumberdaya manusia. Diperlukan adanya pengembangan dan edukasi terkait pengelolaan BUMDes agar peran dan fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Andi, Y., Marlina, T., & Fahmi, A. (2016). Pelatihan Membuat Laporan Keuangan dengan Microsoft Excel BUMDes Pagelaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 9–12.
- Dr. Edy Sujana, S., & SE. Ak, M. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1).
- Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Hidayah, Z., Mulyana, A., Susanti, E., Lestari, S., Pujiastuti, P., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Terbuka, U. (2018). Pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam kaitannya sebagai infant organisasi. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 1(1), 474–485. <http://prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/46>
- Idrus, M., & Syachbrani, W. (2014). *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Munte*. 3, 792–795.
- Junaid, A., Amiruddin, Muslim, & Arham, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1, 134–142.
- Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>
- Limijaya, A., Fin, M. A., Lusanjaya, G. R., Kurnia, T., Ak, M., Rahayu, P. A., Ak, M., Paramita, M., Putri, R., Ak, M., Chandra, H., Ak, M., Wijaya, C. F., & Ak, M. (2017). *Disusun Oleh : U niversitas Ka tolik Parahyangan*.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124>
- Putri, I. S. H. (n.d.). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Bumdes Desa Tanggung. *Blog.Iain-Tulungagung.Ac.Id*, 1–10. http://blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/2020/09/Laporan-PPL-Ika-Septiana-HP_12403173124.pdf

Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.949>

Rudini, Nurhayati, & Afriyanto. (n.d.). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Langkitin di Desa Langkitin*.

Buku:

Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Akuntansi. Bandung: ALFABETA.

Harahap, Sofyan Syafri (2016). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang - Undangan:

Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017

Permendes No. 4 Tahun 2015 pasal 19

Permendes PDPT (Peraturan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)